

BAB II
KONFIGURASI POLITIK SISTEM POLITIK
DEMOKRASI TERPIMPIN

1. Peranan Eksekutif/Peranan Presiden Soekarno

Ir. Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945-1966. Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945.⁴² Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus sebagai Kepala Negara (*Presidensil/single executive*). Selama revolusi kemerdekaan, sistem pemerintahan berubah menjadi semi-*Presidensial/double executive*. Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri/Kepala Pemerintahan. Ini terjadi karena adanya Maklumat Wakil Presiden No. X dan Maklumat Pemerintah pada bulan November 1945 tentang partai politik. Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia dianggap negara yang lebih demokratis.

Meski sistem pemerintahan berubah, pada saat revolusi kemerdekaan, kedudukan Presiden Soekarno tetap paling penting, terutama dalam menghadapi Peristiwa Madiun 1948 serta saat Agresi Militer Belanda II yang menyebabkan Presiden Soekarno, Wapres Moh. Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan Belanda. Meskipun sudah ada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan diketuai oleh Sjafruddin Prawirwnegara, tetapi pada kenyataannya

⁴² P. Anthonius Sitepu, *Soekarno, Militer dan Partai Politik*, Medan: USU Press. Hal 35.

dunia internasional dan situasi dalam negeri tetap mengakui bahwa Soekarno-Hatta adalah pemimpin Indonesia yang sesungguhnya, hanya kebijakanlah yang dapat menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda.

Setelah pengakuan kedaulatan (pemerintah Belanda menyebutkan sebagai Penyerahan Kedaulatan), Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr. Asaad, yang kemudian dikenal sebagai Republik Indonesia Jawa-Jogja. Namun karena tuntutan dari seluruh Rakyat Indonesia yang ingin kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia, dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah Presiden Konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya.⁴³

Mitos Dwitunggal Soekarno-Hatta cukup populer dan lebih kuat dikalangan rakyat dibandingkan terhadap kepala pemerintahan yakni Perdana Menteri. Jatuh banggunya kabinet yang terkenal sebagai kabinet seumur jagung membuat Presiden Soekarno kurang mempercayai sistem multipartai, bahkan menyebutnya sebagai penyakit kepartaian. Tak jarang ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimbas pada jatuh banggunya kabinet. Seperti peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa dikalangan angkatan udara. Soekarno juga banyak memberikan gagasan di dunia Internasional, keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia-Afrika yang masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan haknya sendiri

⁴³ *Ibid.*

menyebabkan Presiden Soekarno pada tahun 1955 mengambil inisiatif untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasa Sila Bandung di kenal sebagai ibukota Asia-Afrika. Bersama Presiden Joseph Broz Titok (Yugoslavia), Gamal Abdul Nasser (Mesir), Muhammad Ali Jinnah (Pakistan), U Nu (Burma) dan Jawaharlal Nehru (India), ia mengadakan Konferensi Asia Afrika yang membuahkan gerakan nonblok. Berkat jasanya itu banyak negara-negara Asia-Afrika yang memperoleh kemerdekaannya. Namun sayangnya masih banyak pula negara yang mengalami konflik karena ketidakadilan dan masih dikuasai negara-negara adikuasa.

Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dalam dunia Internasional, Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara tersebut. Diantaranya adalah Nikita Khrushchev (Uni Soviet), John Fitzgerald Kennedy (Amerika Serikat), Fidel Castro (Kuba), Mao Tse Tung (RRT). Sejak berakhirnya pemilu 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal ini terjadi karena partai politik sangat berorientasi kepada dirinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan nasional secara menyeluruh.

Soekarno merupakan pencetus lahirnya demokrasi terpimpin, dimana Soekarno sendiri merupakan pelaku politik utama yaitu sebagai Presiden Republik Indonesia. Demokrasi terpimpin menjadi nyata dalam pelaksanaan sistem politik setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia, dimana Presiden Soekarno memainkan peran sebagai pemimpin.⁴⁴ Pada bulan Februari 1957 Soekarno mengumumkan konsepsinya

⁴⁴ Abdul Gaffur, *Pak Harto, Pandangan dan Harapannya*, Jakarta Pustaka Kartini, 1987, hal.228 dan 229.

bahwa negara harus menerapkan sistem pemerintahan baru dengan kabinet gotong royong yang terdiri atas semua partai politik, dan pembentukan Dewan Nasional sebagai wakil kelompok-kelompok fungsional. Dekrit ini mendapat sambutan dari TNI, dibuktikan dengan KSAD mengeluarkan perintah harian yang ditunjukkan pada seluruh TNI untuk melaksanakan dan mengamankan dekrit tersebut. Ini dapat dimengerti karena TNI yang mempelopori kembali ke UUD 1945. Setelah berlakunya Dekrit 5 Juli 1959, keterlibatan militer beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Ketika Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja 10 Juli 1959, sepertiga menteri berasal dari militer.⁴⁵

Selain dukungan TNI, DPR hasil Pemilu dalam sidangnya tanggal 22 Juli 1959 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk bekerja berdasarkan UUD 1945, dan keputusan ini secara langsung disampaikan oleh Mr. Sartono Ketua DPR kepada Presiden Soekarno. Selain PNI, PKI adalah partai yang amat gigih mendukung konsepsi Presiden ini, sementara Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik, Dan PRI menolak keras. Maka terjadilah perdebatan dalam DPR, dalam masyarakat sendiri, bahkan dari daerah datang tantangan yang mengakibatkan gerakan dan pergolakan semakin besar dan meluas.⁴⁶

Dalam menjalankan pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin, terjadi penyeimbangan kekuatan antara kekuatan politik, yaitu Soekarno sebagai Presiden dan Militer yaitu Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia. Soekarno membutuhkan PKI karena merasa terancam akan kemungkinan pengambilalihan kekuasaan oleh Angkatan Darat. PKI merupakan partai politik yang kuat, pada Pemilu 1957 di Jawa, PKI mampu memperoleh 27% suara. Atas perlindungan dari

⁴⁵ Bilver Singh, *Dwi Fungsi ABRI, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.*, hal. 231

⁴⁶ Abdul Gafur, *op.cit.*, hal.230.

Presiden Soekarno antara tahun 1959-1962 PKI dengan bebas melakukan kongres dan konferensi, memobilisasi massa secara intens, sehingga dalam waktu yang singkat PKI mengklaim anggotanya telah mencapai sebelas juta.⁴⁷ Soekarno membutuhkan PKI guna memperlancar kampanye anti Barat yang secara intensif dilakukannya, yaitu anti imperialisme dan kolonialisme, dan dalam rangka pembebasan Irian Barat. Bagi Soekarno hanya PKI yang mampu melakukan pengerahan massa dalam rangka kampanye tersebut. PKI tidak mempunyai pilihan lain kecuali mendukung Presiden Soekarno dalam rangka menghadapi Angkatan Darat yang dikenal sangat anti komunis, dan dianggap sebagai penghambat usaha-usaha PKI untuk melebarkan kekuasaannya. Bagi PKI langkah ini ditempuh bahkan dengan mengorbankan prinsip-prinsip ideologinya sendiri yaitu dengan melakukan domestikasi ideologinya.

Ketika pemerintah melakukan pengaturan terhadap sistem kepartaian di Indonesia pada tahun 1960 dengan mempersyaratkan agar semua partai harus menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar utama ideologinya. PKI tak punya pilihan lain, kecuali menerimanya. Karena kalau tidak sewaktu-waktu PKI dapat dibubarkan oleh Presiden seperti yang terjadi pada Masyumi dan PSI pada Agustus 1960. Tentu saja PKI memperoleh manfaat dari aliansinya dengan Soekarno, misalnya dengan memanfaatkan popularitas Soekarno untuk kepentingan PKI. PKI pun dapat secara langsung memperkuat pengaruhnya terhadap Soekarno ketimbang kekuatan politik lainnya, lewat eksploitasi semangat anti kolonialisme dan imperialisme.

⁴⁷ P. Anthonius Sitepu, *Op. cit.* hal 45.

Soekarno berbagi kekuasaan dengan Angkatan Darat, karena dalam kenyataannya AD mempunyai kekuasaan riil terutama di daerah-daerah. Ketika Soekarno mengumumkan negara dalam Keadaan Darurat Perang tanggal 14 Maret 1957, Angkatan Darat di daerah-daerah memainkan peranan yang sangat menentukan karena merupakan Pelaksana Penguasa Perang Daerah (Paperda). Hubungan antara AD dan Presiden merupakan hubungan yang saling menguntungkan, AD tidak dapat menyingkirkan Soekarno karena hal itu akan mendapat tantangan dari kalangan masyarakat sipil lainnya. Soekarno adalah figur yang populer, baik sebagai proklamator dan sebagai tokoh nasionalis sejati yang memiliki dukungan massa yang sangat besar, dan sebagai kepala negara Soekarno merupakan simbol negara dan sekaligus pemerintahan.⁴⁸

Selama pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, golongan fungsional terutama TNI sesungguhnya ditempatkan pada posisi sulit. Pada suatu pihak harus berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, sedangkan pada pihak lain harus menghadapi berbagai rongrongan intimidasi dan usaha dominasi PKI. Presiden Soekarno membiarkan belangsungnya proses *balance of power* antara dua kekuatan politik utama pada waktu itu, yakni TNI dan PKI. Bahkan dikalangan TNI sendiri dilakukan politik *divide at impera*, dimana angkatan dan angkatan diadu domba. Konstelasi politik menuju kepada interaksi tiga kekuatan yaitu kekuatan Soekarno-TNI-PKI.

Walaupun sudah kembali ke UUD 1945, namun dengan adanya Konsepsi Presiden yang menghendaki perubahan sistem politik dari Demokrasi Parlementer diubah menjadi Demokrasi Terpimpin, maka kondisi perpolitikan di Indonesia

⁴⁸ *Ibid.* hal. 47.

tidak menjadi lebih baik. Demokrasinya tenggelam, sedangkan panji-panji pemimpinnya sangat menonjol di tangan seorang Presiden sebagai pemusatan kekuasaan. Pemusatan kekuasaan tersebut terlihat dari tindakan-tindakan Presiden sebagai berikut:

- a. Beberapa pejabat Lembaga Tinggi Negara diangkat menjadi Menteri, antara lain Jaksa Agung menjadi menteri.
- b. Jabatan Kepala Staf, Kepala Gabungan dihapus, Panglima Angkatan Darat diangkat menjadi menteri.
- c. Sewaktu Presiden mengajukan RAPBN ditolak DPR, Lembaga Tinggi tersebut dihapuskan. Padahal DPR mempunyai hak/fungsi kontrol terhadap Presiden sebagai Mandataris MPR.
- d. Memunculkan doktrin Nasakom (Nasional, Agama, Komunis) sehingga PKI merajalela, mempengaruhi organisasi lain, termasuk TNI supaya mengikuti doktrin Nasakom.

TNI menolak Nasakom, karena TNI tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, di lain pihak harus menghadapi berbagai macam rongrongan, intimidasi dan usaha dominasi PKI. Usaha PKI yang hendak mempersenjatai kaum buruh tani untuk dijadikan Angkatan Kelima ditentang oleh TNI, sehingga TNI dicap sebagai lawan PKI. Pada masa itu, peran politik militer semakin maju dan digalakkan untuk menghadapi manuver-manuver politik PKI yang dirasakan semakin mengancam eksistensinya dan memperburuk sosial politik. Dalam menghadapi kerawanan sosial-politik seperti itu TNI melakukan tindakan-tindakan antara lain:

1. TNI mendirikan Badan Kerja Sama (BKS) antara buruh-militer dan tani-militer.
2. Mendirikan Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI), Musyawarah Keluarga Gotong Royong (MKGR) dan Organisasi Serba Guna Gotong Royong (KOSGORO).
3. Membentuk Babinsa di Pedesaan dan Koramil di Kecamatan.
4. Mempelopori berdirinya Sekretaris Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Dalam sistem politik Demokrasi Terpimpin dapat dikatakan bahwa peran partai-partai politik sudah mulai berkurang (lemah). Hal ini disebabkan karena dalam sistem Demokrasi Terpimpin, dimana Presiden tidak saja merupakan Kepala Negara akan tetapi juga ia berperan sebagai Kepala Pemerintahan (eksekutif). Ini berarti semua kebijakan pemerintahan dikendalikan oleh Presiden. Eksekutif tidak bertanggung jawab kepada Parlemen. Di samping itu memang sudah sejak lama, tidak menyukai sistem banyak partai seperti yang telah dilaksanakan pada masa sistem Pemerintahan Parlementer.⁴⁹

Ketidaksenangan Soekarno dengan sistem banyak partai dapat dilihat dari dikeluarkannya : Surat Penetapan Presiden (Penpres) No.7 Tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian tanggal 31 Desember 1959. Peraturan Presiden No.13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-partai. Tentang pembubaran dan penolakan terhadap pengakuan partai-partai tersebut dilakukan dalam bentuk Keputusan Presiden, yaitu:

⁴⁹ P. Anthonius Sitepu, *Transformasi Kekuatan-kekuatan Politik dalam Konfigurasi Politik Sistem Politik Indonesia*, Politeia Jurnal Ilmu Politik Vol. I Juni 2005, hal. 38.

1. Kepres No.200 Tahun 1960 tanggal 17 Agustus 1960 dalam diktumnya berbunyi: Membubarkan Partai Politik Masyumi.
2. Kepres No.201 Tahun 1960 tanggal 17 Agustus 1960 dalam diktumnya berbunyi: Membubarkan Partai Sosialis Indonesi (PSI).
3. Kepres No.129 Tahun 1961 tanggal 14 April 1961 dalam diktumnya berbunyi: Menolak mengakui sebagai Partai Politik seperti dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No.13 Tahun 1960, yaitu untuk:
 1. PSII-Abikusno Tjokrosujo
 2. Partai Rakyat Nasional (PRN) Bahasa Daeng Lalo
 3. Partai Rakyat Indonesia
 4. Partai Rakyat Nasional-Djodi Gandoksomo.⁵⁰

Demokrasi Terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa Demokrasi Parlementer. Maka, dapat disimpulkan bahwa adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era Demokrasi Terpimpin adalah:⁵¹

- Mengaburnya sistem kepartaian, kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam kerangka konstestasi politik untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan (karena pemilihan umum tidak pernah dijalankan), tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik tambang antara Presiden Soekarno, AD, dan PKI. Namun, yang perlu dicatat adalah bahwa partai politik masih memiliki otonomi dan proses internalnya, walaupun kemudian dalam perjalanan selanjutnya dibatasi hanya sepuluh partai politik saja.

⁵⁰ P. Anthonius Sitepu, *Soekarno, ... Op. cit.* hal.50-51.

⁵¹ Djanwar, *Mengungkap Penghianatan/Pemberontakan G30S/PKI*, Bandung: CV.YRAMA. hal.53.

- Dengan terbentuknya DPR-Gotong Royong peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Sebab, DPR-GR kemudian lebih merupakan instrumen politik Presiden Soekarno. Proses rekrutmen politik lembaga ini pun ditentukan oleh Presiden.
- *Basic human rights* menjadi sangat lemah, Soekarno dengan sangat mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Sejumlah lawan politiknya menjadi tahanan politik Soekarno, terutama yang berasal dari kalangan Islam dan sosialis.
- Masa Demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat dari semangat anti kebebasan pers, sejumlah surat kabar dan majalah diberanguskan oleh Soekarno, misalnya Harian Abadi milik Masyumi, dan Harian Pedoman milik PSI.
- Sentralisasi kekuatan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang sangat terbatas, UU tentang Otonomi Daerah No.1/1957 diganti dengan Penetapan Presiden, yang kemudian dikembangkan menjadi Undang-Undang No.18 Tahun 1965.⁵²

⁵² P. Anthonius Sitepu, *Soekarno..Op.cit*, hal 54.

2. Militer

Modal utama rakyat dalam perjuangan bersenjata adalah pemuda yang mempunyai semangat dan keberanian tinggi serta rela berkorban untuk membela bangsa dan negara, dengan cara melawan kekuatan asing yang ingin menjajah kembali. Pemuda ini berasal dari berbagai organisasi, seperti tentara sukarela Pembela Tanah Air (PETA), Seinendan (Prajurit pemula/organisasi pemuda), Keibondan (Pasukan keamanan), Shusintai (Barisan Pelopor), Hizbullah, Gokukotai (Pasukan Pelajar), Heiho (pembantu prajurit), dan pemuda-pemuda mantan KNIL. Pemuda tersebut berasal dari berbagai agama, aliran politik, dan daerah merasa mempunyai tugas bersama untuk memelopori perjuangan kemerdekaan dan perebutan kekuasaan dari Jepang.⁵³

Para pemuda yang sudah cukup mendapat pendidikan dan pelatihan ketentaraan adalah KNIL dan PETA. KNIL adalah tentara yang dibentuk oleh penjajah Belanda untuk kepentingannya. Bekas KNIL terbagi dua : mereka yang aktif menjadi perwira pada penjajahan Belanda, dan bekas perwira KNIL dari pendidikan calon perwira cadangan (CORO) dan akademi militer kerajaan Belanda (KMA) di Bandung yang relatif muda seperti A.H Nasution, T.B Simatupang, A.E Kawilarang, G.P.H Djatikoesoemo. Golongan muda inilah yang memiliki dan memahami semangat revolusi. PETA dibentuk pada Oktober 1943, didukung oleh Pusat Tenaga Rakyat (Putera) yang dipimpin oleh Soekarno dan Dewan Pertimbangan Pusat. Dari sudut pandang Jepang, PETA akan digunakan sebagai pasukan gerilya untuk melawan pihak Amerika dan sekutunya jika mendarat di Indonesia. Dari pandangan bangsa Indonesia, para pemuda yang

⁵³ *Ibid.* hal. 53-54.

memiliki latihan ketentaraan ini akan digunakan sebagai persiapan untuk membentuk tentara Indonesia meskipun melalui pelatihan Jepang.

Setelah PETA dilucuti dan dibubarkan, Indonesia tidak mempunyai pasukan bersenjata untuk mempertahankan diri terhadap masalah luar dan dalam negeri. Pada tanggal 22 Agustus Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengumumkan terbentuknya sebuah Badan Penolong Korban Perang yang secara keorganisasian mencakup sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Di dalam Undang-Undang pembentukannya, BKR berfungsi secara samar-samar sebagai pemelihara keamanan bersama dengan rakyat dan badan-badan negara yang bersangkutan.⁵⁴ BKR akan ditempatkan di bawah pengarahannya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dan cabangnya akan dibentuk di semua tingkat pemerintahan yang lebih rendah, di bawah pengawasan cabang Komite Nasional Indonesia di daerah.

Pemuda-pemuda dengan berbagai latar belakang dipersilahkan masuk ke dalam BKR tetapi diutamakan bekas-bekas anggota PETA, sedangkan pimpinan BKR jatuh ke tangan opsir-opsir PETA. Korps perwira BKR dengan cepat merasa terikat dengan pemerintah dan memiliki disiplin yang tinggi. Pada tanggal 5 Oktober 1945, melalui Maklumat Pemerintah yang ditandatangani Soekarno, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sesuai dengan namanya, TKR berfungsi memelihara keamanan rakyat dalam negeri dan status sudah diubah menjadi tentara.

⁵⁴ *Ibid.*

Kedatangan Belanda yang membonceng tentara Inggris menyebabkan Indonesia mengambil sikap yang secara simbolis lebih militan. Tanggal 1 Januari 1946 Kementerian Keamanan diubah menjadi Kementerian Pertahanan dan TKR diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan pada tanggal 21 Januari TKR diberi nama baru sebagai Tentara Republik Indonesia dalam sebuah panitia besar untuk reorganisasi tentara, Letjend Oerip Soemohardjo sebagai ketuanya dengan tegas mencari jalan untuk meningkatkan efisiensi tentara.

Pada tanggal 7 Juni 1947 Tentara Republik Indonesia dan laskar-laskar tentara kebangsaan disatukan dengan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Semenjak tahun pertama Republik Indonesia berdiri, para perwira militer Indonesia sebenarnya sudah mempunyai kecenderungan untuk berpolitik sebagai prajurit revolusioner. Kecenderungan ini semakin diperkuat ketika mereka harus mengatasi ancaman dari luar (Belanda) dan dari dalam negeri yaitu mengatasi peristiwa politik yang kritis atas penculikan politikus yang terjadi pada tanggal 3 Juli 1946 dan pemberontakan komunis di Madiun pada tahun 1948. Tetapi turut sertanya tentara militer Indonesia dalam politik Indonesia mulai terlihat jelas pada tahun 1952 ketika terjadinya peristiwa 17 Oktober yaitu keadaan darurat perang, yang memberikan semacam dasar hukum kepada militer untuk melakukan fungsi nonmiliter, terutama dalam hal politik.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh P.Anthonius Sitepu dalam tulisannya yang berjudul “Transformasi Kekuatan-kekuatan Politik dalam Konfigurasi Sistem Politik Indonesia” untuk mempertegas munculnya peran militer dalam politik, yaitu :

Peran militer dalam persatuan politik nasional atau dalam sistem politik dapat dikatakan bermula saat Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei 1957 pasca peran partai-partai politik (minus PKI) dilumpuhkan, Undang-undang Darurat diberlakukan. Tujuan utama dari Dewan Nasional menurut Soekarno adalah untuk membantu kabinet dalam menjalankan program-programnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya adalah untuk mengambil alih kekuasaan partai-partai politik. Keanggotaan Dewan Nasional disebut golongan-golongan fungsional, dalam masyarakat merupakan pejabat-pejabat militer yang dipandang penting. Rumusan golongan-golongan fungsional bagi pandangan Presiden Soekarno (9 Juli 1957) merupakan cakupan terhadap person-person golongan buruh, petani, intelijensi, seniman, kaum wanita dan orang-orang muslim, kristen, para pengusaha nasional, personal Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.⁵⁵

Pada bulan Juli 1958 militer diakui sebagai kekuatan politik golongan fungsional dan wakil-wakil militer berhasil didudukkan dalam Dewan Nasional yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan SOB dan tampilnya Jenderal A.H Nasution secara dominan dalam percaturan politik nasional sebagai pimpinan militer. Tampilnya militer ke dalam politik disebabkan lumpuh dan tidak berfungsinya partai-partai politik dalam menjalankan pemerintahan serta dalam mengatasi masalah nasional dalam struktur politik yang ada. Lemahnya partai-partai politik ini menyebabkan terbukanya peluang yang besar bagi kekuatan politik ekstrakonstitusional, dalam hal ini golongan militer, untuk bertindak dalam politik mengindahkan perundang-undangan, untuk mendukung tindakan inkonstitusional guna kepentingan politik militer. Golongan militer di Indonesia berhasil memegang fungsi-fungsi politik secara dominan melalui proses bertahap, sejalan serta dalam kerangka kebudayaan masyarakat Indonesia yang paternalistik dan dipengaruhi oleh nilai-nilai Jawa.

⁵⁵ P. Anthonius Sitepu, *Politeia Transformasi...Op. cit*, hal.39.

Terkait dengan uraian di atas, Fattah menuliskan kedudukan militer dalam demokrasi terpimpin⁵⁶, yaitu :

Pada masa Demokrasi Terpimpin, tentara khususnya Angkatan Darat, menjadi kekuatan politik yang menonjol karena partai politik kurang terorganisasi, sedangkan Partai Masyumi dan PSI telah dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena terlibat dalam mendukung pemberontakan daerah. Sementara itu menguatnya PKI dalam percaturan politik mendorong tentara untuk terlibat secara lebih jauh dalam politik. Untuk mengimbangi kekuatan tentara dan pendukung Nasakom, maka PKI mendapat tempat dari Presiden Soekarno.

Militer tampil sebagai salah satu kekuatan politik pada masa Demokrasi Terpimpin, dimana militer memiliki peran ganda dalam negara yaitu sebagai fungsi pertahanan dan perannya dalam dunia politik, lebih jelas ditegaskan oleh Bilveer Singh dalam bukunya yang berjudul *Dwifungsi ABRI* yaitu :

Sejak berlakunya Dekrit 5 Juli 1959, keterlibatan militer beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Ketika Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja pada tanggal 10 Juli 1959, sepertiga menteri berasal dari militer. Nasution sendiri menjadi Menteri Pertahanan dan keamanan, yang memberinya wewenang melakukan koordinasi antara Departemen Pertahanan, Peradilan, Kepolisian, dan urusan Veteran sekaligus tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ia juga berhak membatalkan pengangkatan kaum komunis ke Kabinet Kerja. Ketika Soekarno mendirikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tahun 1960, 35 dari 283 anggotanya adalah TNI. Setelah inilah, Nasution untuk pertama kalinya menggunakan "Dwifungsi" dalam sebuah Pidato di Porong Jawa Timur.

Selama masa Demokrasi Terpimpin, ketika militer diakui sebagai kelompok fungsional di bawah UUD 1945, aparat teritorial militer dipakai untuk menyaingi PKI, yang menjadi partai paling kuat selama periode ini. Bangkitnya PKI disebabkan oleh karena dibubarkannya partai-partai politik besar, seperti Masjumi dan PSI, juga disebabkan oleh lemahnya PNI. Karena Soekarno juga melihat perlunya meredam membesarnya kekuatan militer, ia semakin menyandarkan diri pada PKI untuk mengimbangi militer, dan dengan demikian ia juga melindungi PKI dari serangan-serangan militer. Soekarno juga mendorong terjadinya persaingan dalam tubuh militer sebagaimana telah berkembang pada awal tahun 1950-an, dengan sasaran melemahkan Angkatan Darat bersenjata sebagai Kekuatan Politik, maka berlangsunglah segitiga perimbangan kekuatan dalam sebagian besar periode ini sampai pecahnya kudeta PKI bulan September 1965.⁵⁷

⁵⁶ Abdul Fattah, *Demiliterisasi Tentara Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, Yogyakarta: LKiS.

⁵⁷ Bilveer Singh, *Op.cit.* hal.93.

Hal ini selanjutnya lebih dipertegas oleh Yahya Muhaimin yang menuliskan bahwa :

Pada bulan Juni 1960, Soekarno berhasil menyusun parlemen yang disebut DPR Gotong Royong dengan anggota 263 anggota, dan 132 anggota di antaranya adalah dari wakil-wakil golongan fungsional : yaitu 15 orang wakil Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara masing-masing mendapat tujuh wakil, dan Polisi lima kursi (sedang PKI memperoleh 30 kursi, belum terhitung golongan-golongan fungsional yang berada di bawah arus politiknya seperti SOBSI, BTI, Gerwani, SARBUPRI, Pemuda Rakyat, dan ex-PERBEBSI) ; semuanya ditunjuk Soekarno.⁵⁸

3. Partai Politik dan Sistem Kepartaian

3.1. Partai Politik

Partai politik adalah sekelompok orang yang menggabungkan kekuatannya untuk mencapai sasaran politik dan sosial mereka bersama. Partai politik terbentuk di semua negara dan masyarakat dimana anggota masyarakatnya dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Kondisi ini memungkinkan orang-orang dan anggota partai untuk kemudian mengartikulasikan keinginan politik mereka dan berjuang untuk merealisasikan tujuan politik mereka sebagai suatu kelompok.⁵⁹

Defenisi Partai politik menurut UU Republik Indonesia No.2 tahun 2008 tentang Partai politik: Partai politik adalah organisasi politik yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

⁵⁸ Yahya Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982, hal.121.

⁵⁹ Harmut Hess, *Pekerjaan Partai dalam Partai-partai Sosial Demokrat*, Fredrich-Ebert-Stiftung, Jakarta: Sumber Rezeki, 2007, hal. 15.

Partai sebagai kekuatan politik adalah suatu gejala baru bagi semua negara di dunia. Partai-partai yang terorganisir timbul pada akhir abad 18 dan 19 di Eropa Barat, sebagai buah usaha dari usaha kelompok-kelompok di luar lingkungan kekuasaan politik untuk bersaing memperebutkan jabatan pemerintahan dan mengendalikan jabatan pemerintahan. Ketika gerakan gerakan kelas buruh dan kelas menengah ini mulai mendesak kelas atas dan aristokrat demi partisipasi dalam pembuatan keputusan, kelompok yang menjalankan pemerintahan terpaksa mencari dukungan publik dalam rangka mempertahankan pengaruh dukungan mereka. Dengan demikian partai-partai politik tersebut merupakan penghubung antara rakyat dengan pemerintah, dan di dunia modern, sifat-sifat dari sistem kepartaian suatu negara menentukan sifat dari hubungan ini.

Partai politik merupakan salah satu bagian kekuatan politik yang berperan penting dalam suatu negara. Banyak defenisi yang dikemukakan para ilmuwan tentang partai politik. Carl Fredrich memberi batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materil dan idil kepada para anggota partainya. Dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materil dan idil kepada para anggotanya.⁶⁰ Sementara itu, Soltau memberikan defenisi partai politik sebagai suatu kelompok warga negra yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijaksanaan umum yang mereka

⁶⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992, hal.116.

buat.⁶¹ Partai politik bisa juga dikaitkan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional demi melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁶²

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diartikan bahwa partai politik pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yaitu organisasi yang teratur, terdiri dari orang-orang yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama yaitu merebut dan mempertahankan kekuasaan. Adapun cara-cara yang dipakai untuk mencapai tujuannya, partai politik turut serut dalam kegiatan konstitusional seperti pemilihan umum.

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun. Namun demikian ada beberapa fungsi lain dari partai politik yang juga sangat penting.⁶³

Miriam Budiarjo menyebutkan beberapa fungsi dari partai politik di dalam negara yang demokratis:

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai sarana proses-proses dimana seseorang memperoleh sikap dan sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari

⁶¹ Ramlan Surbakti, *Log. Cit.*

⁶² Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1998, hal.71.

⁶³ Miriam Budiarjo, *loc.cit.*

masa anak-anak sampai dewasa. Di samping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3. Partai politik sebagai sarana *recruitmen* politik, yaitu mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian, partai juga turut memperluas partisipasi politik dengan cara melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Termasuk mengusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan menggantikan pimpinan lama (*selection of leadership*).
4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*). Dalam sarana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika terjadi konflik, partai politik berusaha mengatasinya.

3.2. Sistem Kepartaian

Maurice Duverger dalam bukunya yang terkenal *Political Parties*, menjelaskan klasifikasi sistem partai, yaitu sistem partai tunggal (*single party system*), sistem dua partai (*two party system*), dan sistem multi partai (*multi party system*).⁶⁴

3.2.1 Sistem Partai Tunggal

Suasana kepartaian non-kompetitif oleh karena partai-partai yang ada harus menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan bersaing

⁶⁴ P. Anthonius Sitepu, *Op. cit.* hal. 29

secara merdeka melawan partai itu. Kecenderungan untuk mengambil pola sistem partai tunggal disebabkan karena di negara baru, pimpinan sering dihadapkan dengan masalah integritas berbagai golongan, daerah dan suku yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya. Negara yang berhasil meniadakan partai lain adalah Uni Soviet. Partai Komunis Uni Soviet bekerja dalam suasana non-kompetitif : tidak ada partai lain yang boleh bersaing serta organisasi yang bernaung di bawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat serta menekan perpaduan dari kepentingan partai dengan kepentingan rakyat secara menyeluruh.

3.2.2 Sistem Dua Partai

Dalam pustaka ilmu politik pengertian sistem dua partai atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai besar. Dalam sistem ini partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa dan partai oposisi. Sistem dua partai umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan *single-member constituency* (sistem distrik) dimana dalam setiap daerah pemilihannya hanya dapat dipilih satu wakil saja. Sistem pemilihan ini mempunyai kecenderungan untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan partai kecil, sehingga dengan demikian memperkuat sistem dua partai.

3.2.3 Sistem Multi Partai

Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman dalam komposisi masyarakat menjerumuskan ke berkembangnya sistem banyak /multipartai. Dimana perbedaan ras, agama dan suku bangsa adalah sangat kuat. Golongan masyarakat cenderung menyalurkan ikatan-ikatan primordial (keterbatasan) tadi dalam satu wadah saja.

Pola multi partai dianggap lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada pola dua partai. Sistem multipartai ditemukan di Indonesia, Malaysia, Belanda, Perancis, Swedia dan lain-lain. Pola banyak partai umumnya diperkuat dengan sistem pemilihan Perwakilan Berimbang (*Proportional Refresentation*) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan kecil. Melalui sistem perwakilan berimbang partai-partai kecil dapat menarik keuntungan dari ketentuan-ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatu daerah pemilihan dapat ditarik daerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memenangkan suatu kursi.

Sejarah mencatat untuk pertama kali partai politik tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Barat, yang merupakan suatu tahap agar pemerintahan yang dijalankan harus berdasarkan konstitusi dan perwakilan.⁶⁵ Hasil pembangunan politiknya telah mampu membatasi kekuasaan *Monarchi Absolute* dan perluasan hak-hak warga negara. Kebebasan inilah yang mendorong lahirnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, sebab berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Dimana rakyat dapat menentukan pilihannya dengan leluasa, memperjuangkan kepentingannya, mengkritik rezim yang memerintah, melakukan tata hubungan politik dan lain-lain. Terkait dengan hal tersebut, kebangkitan partai politik bagi Indonesia, ternyata dalam kehidupan kepartainnya baru dapat dilacak kembali secara samar-samar sampai tahun 1908-an.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid* hal. 59.

⁶⁶ P. Anthonius Sitepu, *Politeia Transformasi Kekuatan... Op.cit.* .hal 26.

Indonesia menganut sistem multipartai, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah partai yang berkembang di Indonesia. Misalnya pada Pemilu pertama Indonesia terdapat 28 partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia
2. Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi)
3. Nahdatul Ulama (NU)
4. Partai Komunis Indonesia (PKI)
5. Partai Syarikai Islam Indonesia (PSII)
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
7. Partai Katholik
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI)
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
10. Partai Islam Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah)
11. PRN
12. Partai Buruh
13. GPPS
14. PRI
15. PPPRI
16. Partai Murba
17. Baperki
18. PIR Wonsonegoro
19. Garinda
20. Permai

21. Persatuan Daya
22. PIR Hazairin
23. PPTI
24. AKUI
25. PRD
26. PRIM
27. Acoma
28. Partai R. Soejono Praawiro Soedarmo

Dari hasil Pemilu tahun 1955 tersebut terdapat empat partai yang secara nasional menjadi pemenang, yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI. Setelah pemilu, partai-partai tersebut merasa mempunyai legalitas dan memperoleh kekuasaan politik secara formal. Dalam lembaga legislatif hasil Pemilu 1955 terdapat kubu-kubu yang menghendaki falsafah negara adalah Islam, sedangkan di pihak lain tetap Pancasila.⁶⁷

3.3 Partai Politik di Indonesia

Dilihat dari sudut ideologi dasar, munculnya partai politik di Indonesia pada masa pra kemerdekaan secara garis besar adalah sebagai aktualisasi dari tiga aliran atau pandangan politik yang menemukan momentum kelahirannya pada abad ke-20, yaitu Islam, Nasionalisme dan Marxisme/Nasionalisme. Aktualisasi aliran Islam muncul pertama kali dalam Sarekat Islam (SI), sebagai partai politik pertama yang bercorak nasional. Partai Sarekat Islam sering dianggap sebagai partai pelopor dan partai ini menjadi dinamis di bawah pimpinan Hos

⁶⁷ Inu Kencana Syafei, *Op. cit*, hal. 134.

Cokroaminoto. Hal yang menarik dari Sarekat Islam pada periode awal adalah mampu mengidentifikasikan dirinya dengan aspirasi politik Bumi Putera untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pada tahun 1920-an dengan kelahiran PKI, dan PNI yang bercorak ideologi Marxisme dan Nasionalisme, membawa dampak wibawa Sarekat Islam menurun, dan tidak mampu bersaing dengan ideologi-ideologi modern yang berasal dari Barat dalam merebut massa rakyat.

Di Indonesia, partai politik secara formal dapat dilihat pada sistem kepartaian berdasarkan Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945, menyebutkan bahwa atas dasar usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat kepada pemerintah agar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai politik.

Maklumat pemerintah

Berhubung dengan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat kepada Pemerintah, supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi, bahwa partai-partai itu hendaknya memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannya yang telah diambil beberapa waktu yang lalu bahwa:

1. pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada pada masyarakat.
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun, sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat bulan Januari 1946.

Jakarta, 3 November 1945
Wakil Presiden

Muhammad Hatta

Partai politik yang berdiri sejak dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 diklasifikasikan dalam buku kepartaian Indonesia/terbitan Kementerian Penerangan tahun 1951 yaitu;⁶⁸

- Dasar Ketuhanan: Masyumi, Partai Syarikat Islam (PSI), Pergerakan Tarbiah Islam (Perti), Partai Kristen Indonesia (Perkindo), dan Partai Katolik.
- Dasar Kebangsaan; Partai Nasional Indonesia (PNI), Persatuan Indonesia Raya(PIR), Partai Indonesia Raya (Parindra), Partai Rakyat Indonesia (PRI), Partai Demokrasi Rakyat (Banteng), dan lain-lain.
- Dasar Marxisme; Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia, Partai Murba, Partai Buruh, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai).
- Partai lain-lain; Partai Demokrat Tionghoa, Partai Indonesia Nasional (PIN).

Di samping itu ada dua partai yang cukup besar pengaruhnya di dalam masyarakat yakni Nahdlatul Ulama (NU) yang secara resmi berdiri sebagai partai politik yang bernafaskan Islam tahun 1952, dan Partai Ikatan pendukung kemerdekaan Indonesia (IPKI) berdasarkan kebangsaan.

Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan di bidang politik, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan bentuk dan proses pemerintahan yang berlevelkan negara. Infrastruktur yang paling nyata adalah keberadaan partai politik di Indonesia, Era terakhir kolonialisme adalah ketika kita menyaksikan kelahieran Budi Utomo, Syarikat Islam Muhammadiyah, NU, PNI, PKI, Taman Siswa, Parindra dll.

⁶⁸ P. Anthonius Sitepu, *Soekarno...Op. cit*, hal. 66.

Peranan Nahdatul Ulama (NU) tidak hanya dalam perjuangan dan pergerakan politik sebelum dan sesudah kemerdekaan, melainkan juga karena keikutsertaannya dalam implementasi politik yang berwujud pemerintahan dalam penyelenggaraan roda pemerintahah Republik Indonesia. Tokoh-tokoh NU berpartisipasi mengambil keputusan politik tertinggi bangsa dan negara dalam mewujudkan kedaulatan. NU adalah gerakan ulama-ulama Islam di Indonesia yang dipelopori oleh K.H Wahid hasyim Asyari. Melalui lembaga pendidikan pondok pesantren, NU berhasil menanamkan semangat dan watak anti kolonialisme. Dengan bepegang teguh pada ajaran Islam, dan memelihara semangat Ahlus Sunnah Wal Jannah, NU berhail menggalang persatuan dan kesatuan bangsa., khususnya umat Islam di Indopnesia. Sejak berdiri tahun 1926, NU muncul ke permukaan sebagai organisasi sosial keagamaan, dan ikut serta dalam politik formal, bahkan dalam Pemilihan Umum tahun 1955 NU menjadi partai besar di Indonesia.

Muhammadiyah walaupun bukan partai politik tetapi sangat berpengaruh, karena merupakan suatu gerakan tajdid, maksudnya pembaruan, inovasi, restorasi, modernisasi dan kebangkitan umat Islam dalam mencerahkan hati dan fikiran dengan cara kembali ke ajaran Islam sejati berdasarkan Al Quran dan Hadits. Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912, Muhammmadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan yang memberi aham besar secara nasional, karena ikut mendewasakan, memerdekakan dan membangun bangsa Indonesia. Peran Muhammadiyah sangat strategis karena pendidikan yang diembannya membangun masyarakat dalam tiga bidang, yaitu kultur, peradaban dan akidah.

Syarikat Islam adalah salah satu organisasi yang sangat menonjol, sejak semula Syarikat Islam merupakan gerakan politik. Si adalah transformasi dari Syarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Samanhudi. Bukan hanya nama yang berubah, tetapi terutama pada perubahan orientasi, yaitu dari komersial ke politik

Di samping cengkraman kekuasaan Soekarno, masa Demokrasi Terpimpin juga ditandai oleh adanya keinginan kuat kaum militer untuk tampil dalam gelanggang politik dan sejak itu pula muncul kesadaran untuk mengurangi jumlah partai politik, guna mengatasi berbagai gejolak politik. Dengan dikucilkannya PNI dan Masyumi oleh Presiden Soekarno memberikan angin segar bagi PKI untuk berkuasa dan berkiprah lebih leluasa dalam arena politik.⁶⁹

Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai salah satu kekuatan politik yang berpengaruh besar dalam menjalankan proses berlangsungnya sistem politik Demokrasi Terpimpin. PKI adalah partai politik yang berideologi komunis, dalam sejarahnya PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan kolonial Belanda pada tahun 1920, dan mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Di samping aksi-aksi yang dilakukan PKI tersebut, PKI juga hadir dalam peranannya di dalam sistem politik, yang terlihat pada pemilu 1955. Pada pemilu 1955, PKI menempati posisi keempat dengan perolehan 16% dari keseluruhan suara. Partai PKI memperoleh 39 kursi yang diperebutkan dan 80 kursi di Dewan Konstituante.

⁶⁹ *Ibid.*

Pada Februari 1958 terjadi sebuah upaya kudeta yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pro-Amerika di kalangan militer dan politik sayap kanan. Para pemberontak yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi mengumumkan terbentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRR). Pemerintahan yang disebut revolusioner ini segera menangkapi ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang berada dalam kontrol mereka. PKI mendukung upaya Soekarno untuk memadamkan pemberontakan ini, termasuk dengan cara pemberlakuan Undang-undang Darurat. Pemberontakan berhasil dipadamkan dengan bantuan militer.

Pada 1959 militer berusaha menghalangi diselenggarakannya kongres PKI. Namun, kongres ini berlangsung sesuai dengan jadwal dan Presiden Soekarno memberikan kata sambutan pada pembukaan kongres tersebut. Pada 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom yaitu Nasionalis, Agama dan Komunisme. Dengan begitu, peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan. PKI menanggapi dengan positif dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multi-kelas.⁷⁰

Di masa demokrasi terpimpin, PKI berkembang pesat dan menjadi kekuatan politik yang menonjol karena prinsip gotong-royong dan kekeluargaan dalam politik. Sedangkan partai yang gigih melawan PKI yaitu Masyumi dan PSI telah dibubarkan karena tokohnya mendukung pemberontakan di Sulawesi dan Sumatera. Maka terjadilah persaingan antara tiga kekuasaan yaitu TNI, PKI, dan Presiden Soekarno yang menjaga keseimbangan TNI dan PKI. PKI adalah partai yang memiliki pendukung yang sangat besar dan merupakan organisasi

⁷⁰ *Ibid.* hal. 74.

massa modern. Dengan begitu Soekarno sangat bertumpu pada kekuatan PKI yang memiliki dukungan massa yang revolusioner, sementara partai lain dinilainya lemah.

Di bawah pemerintahan Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno, PKI memperoleh keuntungan politik. Ketika itu politik di Indonesia tidak stabil, namun justru kekuatan PKI semakin kuat. Lambat laun PKI menjadi partai partai terkuat dan memiliki pengikut yang luar biasa besarnya. Terutama setelah menjalankan strategi propogandanya. Hal ini meyakinkan PKI untuk meningkatkan kekuatan demi persiapan melaksanakan perebutan kekuasaan, biro khusus dibentuk langsung dibawah pimpinan D.N Aidit tahun 1964 yang mempunyai tugas mematangkan situasi perebutan kekuasaan dan melakukan infiltrasi ke dalam tubuh TNI dan beberapa partai politik. TNI mulai dimasuki PKI dan berhasil mengumpulkan kekuatan bersenjata dengan melatih anggota PKI dan anggota organisasi massanya, seperti Pemuda Rakyat dan Gerwani dalam bidang teknis kemiliteran.

Meskipun PKI mendukung Soekarno, tapi PKI tidak kehilangan otonomi politiknya. Pada Maret 1960, PKI mengecam penanganan anggaran yang tidak demokratis oleh Soekarno. Pada 8 Juli 1960, Harian Rakyat memuat sebuah artikel yang kritis terhadap pemerintahan. Para pemimpin PKI ditangkap oleh Militer, namun kemudian dibebaskan kembali atas perintah Soekarno. Pada Masa demokrasi terpimpin kedudukan PKI semakin berpengaruh kuat dalam menjalankan sistem politik demokrasi terpimpin.

Pada Maret 1962 PKI ikut serta dalam pemerintahan, para pemimpin PKI Aidit dan Nyoto diangkat sebagai Menteri penasihat. Keadaan ekonomi yang

sangat buruk, PKI melancarkan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut penurunan harga beras dan perbaikan ekonomi. Agitasi dilancarkan kepada jendral-jendral TNI sebagai kapitalis birokrat, koruptor dan sebagainya. Gerakan PKI mencapai puncaknya pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 dini hari di Madiun, yang kemudian peristiwa ini menjadi awal berakhirnya kekuasaan PKI.

PKI merupakan salah satu organisasi kader militan yang memiliki ciri-ciri dan kelebihan tertentu, bukan saja dalam segi taktik tetapi juga didalam gerakan-gerakan operasionalnya karena di dalam setiap gerakannya mampu memberikan dukungan untuk mengembangkan doktrin partainya. Mungkin dengan kelebihan-kelebihan tersebut, PKI telah melakukan penghianatan dan pemberontakan yang sangat membahayakan terhadap cita-cita perjuangan bangsa dan negara RI. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan ketetapan MPRS Nomor: XXV/MPRS/1966 PKI telah dibubarkan dan tidak diberi hak hidup bagi PKI dan larangan menyebarluaskan atau mengajarkan paham/ajaran Marxisme/Leninisme/Komunisme di dalam kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa PKI dalam segala aksinya memberi pengaruh yang besar dalam proses berlangsungnya sistem politik Demokrasi Terpimpin, dimana PKI sendiri hadir sebagai salah satu kekuatan politik yang menonjol diantara kekuatan politik lainnya karena PKI memiliki basis massa yang sangat luas di seluruh Indonesia.